

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan representasi dari adanya kesatuan masyarakat hukum terkecil yang hadir dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam tatanan kehidupan di Indonesia.

Desa di Indonesia selalu identik dengan wilayah pinggiran, masih bergantung pada sektor pertanian, dan minimnya fasilitas akibat sulitnya akses untuk menggapai wilayah desa. Namun, hal itu dapat diubah dengan adanya pembangunan dengan prioritas wilayah desa dimana dapat memperlihatkan dimensi pemerataan dan kewilayahan yang menekankan pada strategi pembangunan nasional yang menekankan pada prioritas wilayah desa, pinggiran dan kawasan-kawasan minim fasilitas.

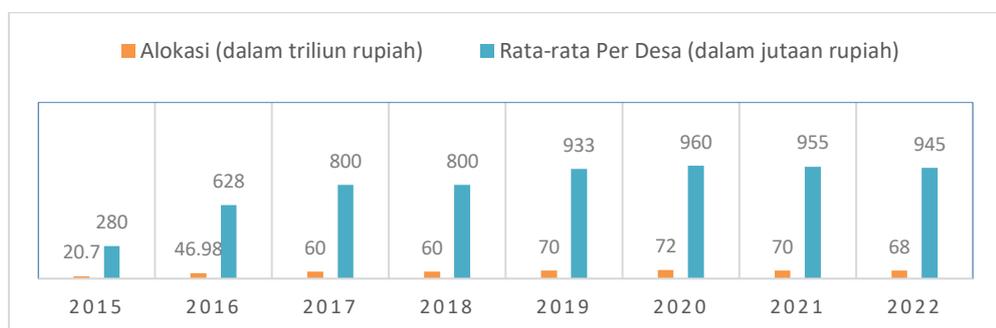
Pembangunan daerah dan desa merupakan agenda utama dalam pemerintah presiden Joko Widodo yang tercantum dalam nawacita ketiga yaitu:

*“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”*

Searah dengan nawacita presiden maka pembangunan lebih diutamakan pada pembangunan desa. Pembangunan bukan lagi mengutamakan pembangunan ibukota namun daerah-daerah pinggiran menjadi urgensi baru bagi pemerintah.

Pembangunan Desa menjadi persoalan yang penting dan menjadi bagian dari target pemerintah, hal tersebut tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Tujuan pembangunan desa yaitu untuk mengurangi jumlah desa tertinggal yang mencapai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri yang ditargetkan mencapai 2.000 desa di tahun 2019. Pada awal RPJMN dibuat, pemerintah telah melakukan pemetaan jumlah wilayah administrasi desa yang teregistrasi melalui Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang berjumlah kurang lebih 74.093 desa.

Adanya prioritas pembangunan di wilayah desa akan memberikan dampak yang besar dan manfaat yang baik bagi kemajuan Indonesia, salah satu dampak baiknya adalah adanya pengurangan migrasi penduduk dari desa ke kota. Hal ini mampu terjadi bila pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, transportasi dilakukan di wilayah desa masif dilakukan. Lebih jauh lagi, bila sarana dan prasarana ekonomi di desa mampu berkembang maka, dapat memberikan sebuah peluang usaha yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk desa.



**Gambar 1.1 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2022**

*Sumber: Kementerian Keuangan (Diolah)*

Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan (Gambar 1.1). Hal ini disebabkan karena adanya pemulihan pasca pandemi sehingga dana desa mengalami pemangkasan sebesar Rp2 triliun pada tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan pembandingan pada tahun sebelumnya. Namun, semenjak digelontorkannya dana desa pemerintah sudah menstimulus desa sebesar Rp461,68 triliun di seluruh Indonesia yang menerima bantuan. Dengan rincian per tahun, yaitu Tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp280juta. Pada tahun 2016 sebesar Rp46,98 triliun dengan rata-rata per desa menerima aloasi dana desa sebesar Rp628 juta, dilanjutkan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp60 triliun, dengan rata-rata per desa mendapatkan lokasi dana desa sebesar Rp800 juta. Tahun 2019 sebesar Rp70 triliun, dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp933 juta. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, sehingga penerimaan dana desa mengalami kenaikan yang dimana alokasi dana desa menjadi sebesar Rp72 triliun dan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp960 juta, diikuti tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp70 triliun dan rata-rata per desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp955 juta, karena fokus APBN pada tahun 2021 adalah pada proses pemulihan dengan membangun sektor kesehatan dengan adanya vaksinasi dan pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata dan UMKM. Tahun 2022 kembali

dikurangi dana desa sebesar Rp2 triliun menjadi sebesar Rp68 triliun dengan rata-rata per desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp945 juta.

Komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah alokasi belanja transfer ke daerah (TKD) dalam jangka menengah. Sesuai dengan amanah undang-undang desa, jumlah alokasi TKD kemudian ditambah dengan komponen dana desa sejak tahun 2018. Bahkan bila ditinjau dalam postur APBN 2022, alokasi dana TKDD mengalami kenaikan dari tahun 2021, data pada tabel 1.1 merupakan data *Outlook 2022*.

**Tabel 1.1 Pengalokasian Belanja *Transfer* ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Negara (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Belanja K/L Pusat (dalam triliun rupiah)</b>	<b>TKDD (dalam triliun rupiah)</b>
<b>2018</b>	2.213,11	846,56	757,79
<b>2019</b>	2.309,28	873,43	812,97
<b>2020</b>	2.595,48	1.059,62	762,53
<b>2021</b>	2.786,41	1.059,43	785,7
<b>2022</b>	3.169,1	1.032,5	799,1

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)*

Alokasi belanja TKDD difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintah; meningkatkan dan memperbaiki pelayanan publik antar daerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Agar

dapat mendukung berbagai kebijakan tersebut maka, anggaran belanja TKDD diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah.

Salah satu potensi terbesar sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat adalah wilayah Priangan Timur yang berada dibagian timur Provinsi Jawa Barat. Priangan Timur merupakan pembagian wilayah tidak resmi yang dibuat dan digunakan pada zaman kerajaan pajajaran yang sekarang wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi. Terkenal sebagai bagian dari sejarah Provinsi Jawa Barat, Priangan Timur menjadi satu bagian penting dalam tumbuhnya budaya dan sektor pariwisata. Beberapa pariwisata terkenal di wilayah Priangan Timur adalah Gunung Papandayan, Candi Cangkuang, Pantai Batu Hiu, *Green Canyon*, Pantai Santolo, dan lain-lain. Kawasan Priangan Timur memiliki empat wilayah administrasi pemerintahan kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Sebagai wilayah yang sedang dikembangkan dalam sektor pariwisata, Priangan Timur menyimpan banyak potensi yang perlu digali, dibangun dan dikelola secara maksimal. Diharapkan mampu memenuhi nawacita presiden dalam membangun desa yang bersinergi membangun dan memiliki daya saing dengan perkotaan.

Dana desa dibuat memang untuk kepentingan kegiatan di pedesaan khususnya pada pemerintah desa sehingga dana desa memang disalurkan melalui pemerintah desa, berbeda dengan kota yang memang merupakan kelurahan dimana dana yang diterima sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014

dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK.

Pengembangan desa wisata di Kawasan Priangan Timur sedang digenjut secara maksimal dan dinilai bisa memanfaatkan dana desa, apalagi dana desa dari tahun ke tahun anggaran dana desa selalu bertambah.

**Tabel 1.2 Dana Desa 4 Kabupaten Kawasan Priangan Timur Tahun 2019-2021**

Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa (milyar rupiah)		
		2019	2020	2021
Kabupaten Garut	442	484,18	504,94	506,04
Kabupaten Tasikmalaya	351	390,09	399,45	402,89
Kabupaten Ciamis	265	254,52	260,24	263,44
Kabupaten Pangandaran	93	89,36	88,35	90,60

*Sumber Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan & Badan Pusat Statistik (Diolah)*

Dilihat dari tabel 1.3, bahwa anggaran dana desa terbesar berada pada tahun 2021 sejalan dengan masa transisi pandemi COVID-19 untuk membangun beberapa sektor di Kawasan Priangan Timur, yang di dalamnya adalah sektor pariwisata. Anggaran dana desa terbesar diterima Kabupaten Garut dengan jumlah desa sebanyak 442 desa dan anggaran dana desa terkecil diterima oleh Kabupaten Pangandaran dengan jumlah desa sebanyak 93 desa.

Maka, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya wilayah Priangan Timur, pemberian dana desa ini diharapkan mampu

mendukung masyarakat dalam mengembangkan desa, meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan dapat menjadikan wilayah desa di Kawasan Priangan Timur menjadi Desa mandiri yang berkonsep desa-kota di Provinsi Jawa Barat.

Data Indeks Pembangunan Desa menjelaskan bahwa desa di Indonesia mengalami perkembangan dan penurunan dalam segi desa tertinggal. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (2018) dimana desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 8,85 persen, dilanjut dengan naiknya desa mandiri sebesar 3,62 persen terhitung dari 2014 hingga 2018. Hal ini seharusnya menjadi satu angka positif dengan adanya penurunan desa tertinggal dan naiknya desa mandiri.

Namun, data tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di lapangan dan beberapa penelitian yang menghasilkan bahwa pemerintah desa tidak mampu membangun desanya dengan baik dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2020), dimana hasil pengukuran kepuasan publik dalam indikator *facilitating condition* di wilayah pariwisata Priangan Timur didapatkan hasil penelitian bahwa responden memberikan nilai rendah dengan nilai 27,56 dari mutu interval 100. Dimana pemerintah desa tidak melakukan perbaikan fasilitas publik dan buruknya penataan tempat wisata di Kawasan Priangan Timur. Hal ini dipertegas dengan manajerial yang buruk dalam penelitian Juliarso (2019), pada desa-desa di Kabupaten Ciamis yang

menjelaskan bahwa sistem SOP pengadaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tidak dilaksanakan secara optimal dan tidak efektifitas dan efisiensi anggaran dana desa yang digunakan. Rofiyqo (2017), menjelaskan bahwa upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya optimal dan kurangnya sumberdaya manusia yang melek akan permasalahan pembangunan desa. Watunwotuk (2021), menjelaskan buruknya kinerja pemerintah desa dalam masa COVID-19 yang dimana menjelaskan bahwa sasaran subsidi tidak menysasar pada masyarakat yang membutuhkan. Ramdhani (2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa efektifitas kebijakan dana desa tidak dapat sesuai dengan SOP, akuntabilitas dan transparansi.

Dari penelitian tersebut dan data yang dimiliki pemerintah adanya *practical knowledge gap* yang menjadikan bahwa efektifitas internal audit pemerintah desa perlu di pertanyakan antara dana desa yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya namun, fakta yang ada bahwa proses pembangunan desa tidak optimal secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu ***“Analisis Efektivitas Komponen Dana Desa Terhadap Output Desa Melalui Konsep Pengelolaan dan Transparansi Akuntabilitas Internal”***.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh komponen dana desa terhadap pengelolaan dana desa di desa wisata Kawasan Priangan Timur?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap *output* dana desa di desa wisata Kawasan Priangan Timur?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap transparansi dan akuntabilitas di desa wisata Kawasan Priangan Timur?
4. Bagaimana pengaruh komponen dana desa terhadap *output* dana desa melalui pengelolaan dana desa di desa wisata Kawasan Priangan Timur?
5. Bagaimana pengaruh komponen dana desa terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan dana desa di desa wisata Kawasan Priangan Timur?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah

1. Untuk menganalisa pengaruh komponen dana desa terhadap pengelolaan dana desa di desa wisata Kawasan Priangan Timur.
2. Untuk menganalisa pengelolaan dana desa terhadap *output* dana desa di desa wisata Kawasan Priangan Timur.

3. Untuk menganalisa pengelolaan dana desa terhadap *output* dana desa melalui transparansi dan akuntabilitas di desa wisata Kawasan Priangan Timur.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian mengenai implementasi dana desa di Kawasan Priangan Timur yaitu:

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Dengan adanya penelitian ini manfaat yang didapatkan oleh penulis adalah sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan dana desa yang sudah dibuat oleh pemerintah.
- b. Sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di dalam karya nyata di masyarakat.

##### **2. Bagi Pemerintah**

- a. Untuk memberikan data dari temuan lapangan mengenai bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa yang berada pada daerah Priangan Timur dalam khususnya di desa-desa wisata.
- b. Untuk memberikan informasi kepada pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, Bupati dan pelaksana kebijakan pembangunan desa mengenai hasil dari kebijakan dana desa dan implementasi di lapangan.

- c. Untuk meninjau efektivitas atau efisiensi kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah mengenai kebijakan pembangunan desa dari hasil implementasi yang terjadi di lapangan.
- d. Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan desa mengenai kebijakan yang perlu dilakukan pada desa-desa wisata.

### 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi sebuah gambaran tentang pengelolaan dana desa sebagai implementasi ketimpangan ekonomi desa dengan kota dalam meningkatkan perekonomian di wilayah Priangan Timur, terutama mahasiswa Universitas Siliwangi.

## 1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah desa-desa wisata di Kawasan Priangan Timur. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan melalui observasi dan pemberian kuesioner, laman resmi dari *Open Data*, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Keuangan.

### 1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan.

